



# GUBERNUR BANTEN

## PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 20 T A H U N 2005

### TENTANG

**PENGGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, perlu menetapkan Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005 dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 80 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Dirjen Pemerintahan Umum Daerah dan Dirjen Anggaran Nomor SE-902/228/Pumda dan SE-17/A/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang Pedoman Penggunaan Dana Perimbangan.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2005.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
5. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih;
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
11. Belanja Aparatur adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya untuk Aparatur, yang terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan (kegiatan non investasi) serta belanja modal;
12. Belanja Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh publik terdiri atas belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan (Kegiatan non investasi) serta belanja modal;
13. Belanja Tidak Tersangka adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan Provinsi Banten Tahun 2005 adalah sebesar Rp.1.452.277.795.083,50 terdiri dari :

- |                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| a. PAD                           | : | Rp. 973.276.022.185,50 |
| b. Dana Perimbangan              | : | Rp. 474.591.772.898,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | : | Rp. 4.410.000.000,00   |

## Pasal 3

- (1) Penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005 dialokasikan untuk :

### BELANJA

- |                                            |   |                        |
|--------------------------------------------|---|------------------------|
| a. Aparatur Daerah                         | : | Rp. 384.219.352.992,29 |
| b. Publik                                  | : | Rp. 521.607.656.737,00 |
| c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | : | Rp. 673.161.195.114,64 |
| d. Belanja Tidak Tersangka                 | : | Rp. 20.000.000.000,00  |

### PEMBIAYAAN

- |                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| a. Penerimaan  | : | Rp. 228.553.927.924,43 |
| b. Pengeluaran | : | Rp. 81.843.518.164,00  |

- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

- (1) Setiap awal bulan Pemegang Kas Dinas, Badan, Biro dan Kantor sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Aparatur dan Publik kepada Gubernur Cq. Biro Keuangan Setda Provinsi Banten;
- (2) Bentuk format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) implementasinya mengacu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah.

## Pasal 5

Kepada Dinas, Badan, Biro dan Kantor melaporkan realisasi Triwulanan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Gubernur Cq. Biro Keuangan paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama Triwulan berikutnya dengan mempergunakan contoh tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.



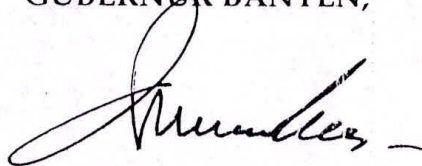
**Pasal 6**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal **3 Juni 2005**

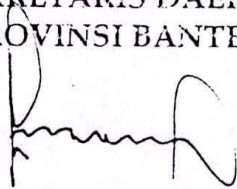
**GUBERNUR BANTEN,**



**D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal **6 Juni 2005**

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**



**CHAERON MUCHSIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR .21..  
SERI : .E..**



REKAPITULASI ALOKASI DAU, PENYEIMBANG DAU, PAD, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN PAD, BAGI HASIL PAJAK, NON PAJAK PENERIMAAN DARI PIHAK KETIGA

| NO | BADAN/DINAS/KANTOR/BIRO                               | JUMLAH ANGGARAN<br>SETELAH PERUBAHAN | PEMBIAYAAN<br>PENGELUARAN | SUMBER PENDAPATAN  |                                |                    |                     |                                     |                           |                               |                                    |                          |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|    |                                                       |                                      |                           | DAU                | PENYEIMBANG<br>DARI PEMERINTAH | PAD                | RETRIBUSI<br>DAERAH | HASIL<br>PERUSAHAAN<br>MILIK DAERAH | LAIN-LAIN PAD<br>YANG SAH | BAGI HASIL<br>PAJAK/NON PAJAK | PENERIMAAN<br>DARI PIHAK<br>KETIGA | PEMBIAYAAN<br>PENERIMAAN |
| 1  | 2                                                     | 3                                    | 4                         | 5                  | 6                              | 7                  | 8                   | 9                                   | 10                        | 11                            | 12                                 | 13                       |
| 1  | - DPRD Provinsi Santen                                | 6.766.766.976,00                     | -                         | -                  | -                              | 6.766.766.976,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 2  | - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               | 3.323.516.952,00                     | -                         | -                  | -                              | 3.323.516.952,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 3  | - Sekretariat Daerah                                  | 871.427.085.217,10                   | (81.843.518.164,00)       | 63.495.326.703,46  | 1.479.947.958,00               | 373.667.627.897,21 | -                   | 8.500.000.000,00                    | -                         | 276.573.772.898,00            | 1.000.000.000,00                   | 228.553.927.924,43       |
| 4  | - Sekretariat DPRD                                    | 39.426.716.601,00                    | -                         | 27.340.064.404,00  | 62.730.697,00                  | 12.023.921.500,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 5  | - Dinas Pendapatan                                    | 72.715.902.743,00                    | -                         | 7.196.124.319,00   | 187.798.814,00                 | 63.651.479.610,00  | 1.680.500.000,00    | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 6  | - Badan Perencanaan Daerah                            | 14.042.313.500,00                    | -                         | 3.293.276.426,00   | 90.338.074,00                  | 10.658.699.000,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 7  | - Badan Pengawasan Daerah                             | 6.759.870.700,00                     | -                         | 2.871.580.403,00   | 61.755.297,00                  | 3.826.535.000,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 8  | - Badan Pendidikan dan Pelatihan                      | 7.220.486.067,40                     | -                         | 2.016.456.304,40   | 70.776.663,00                  | 5.133.253.100,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 9  | - Badan Pemberdayaan Masyarakat                       | 9.146.489.161,00                     | -                         | 1.938.746.391,00   | 65.489.270,00                  | 7.142.253.500,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 10 | - Badan Kesbang dan Linmas                            | 7.448.915.984,00                     | -                         | 1.661.202.663,00   | 58.103.321,00                  | 5.729.610.000,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 11 | - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja                   | 4.852.527.700,00                     | -                         | 3.181.827.671,00   | 62.860.029,00                  | 1.607.840.000,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 12 | - Kantor Penghubung                                   | 2.098.947.600,00                     | -                         | 871.855.764,00     | 16.841.836,00                  | 1.210.250.000,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 13 | - Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah | 4.931.790.573,00                     | -                         | 929.505.178,00     | 19.761.195,00                  | 3.982.524.200,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 14 | - Dinas Pertanian dan Peternakan                      | 17.109.478.553,00                    | -                         | 3.297.086.063,00   | 139.315.290,00                 | 13.673.077.200,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 15 | - Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 15.724.907.761,00                    | -                         | 2.689.367.236,00   | 67.250.224,00                  | 12.968.290.301,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 16 | - Dinas Pertambangan dan Energi                       | 30.758.279.800,00                    | -                         | 2.211.049.349,00   | 56.853.451,00                  | 28.490.377.000,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 17 | - Dinas Kehutanan dan Perkebunan                      | 16.684.116.200,00                    | -                         | 2.347.687.410,00   | 91.283.790,00                  | 14.245.145.000,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 18 | - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi       | 11.661.282.840,00                    | -                         | 3.110.619.894,00   | 107.062.946,00                 | 8.443.600.000,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 19 | - Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah             | 5.314.828.000,00                     | -                         | 1.573.048.259,00   | 46.655.741,00                  | 3.695.124.000,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 20 | - Dinas Kesehatan                                     | 49.424.828.620,00                    | -                         | 6.612.364.216,00   | 91.854.404,00                  | 42.720.610.000,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 21 | - Dinas Pendidikan                                    | 75.315.191.990,00                    | -                         | 12.326.772.209,00  | 96.493.631,00                  | 62.891.926.150,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 22 | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                     | 11.213.307.276,00                    | -                         | 2.102.043.505,00   | 82.659.616,00                  | 9.028.604.155,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 23 | - Kantor Perpustakaan Daerah                          | 4.083.462.040,00                     | -                         | 2.323.126.525,00   | 50.516.015,00                  | 1.709.819.500,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 24 | - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja                       | 14.592.031.102,20                    | -                         | 3.770.947.410,20   | 82.086.210,00                  | 10.738.997.482,00  | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 25 | - Dinas Pekerjaan Umum                                | 283.416.797.146,23                   | -                         | 35.843.335.582,94  | 183.107.322,00                 | 238.294.832.055,79 | -                   | -                                   | 9.095.522.185,50          | -                             | -                                  | -                        |
| 26 | - Dinas Perhubungan                                   | 6.961.379.241,00                     | -                         | 3.206.916.737,00   | 82.305.083,00                  | 3.672.157.421,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
| 27 | - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup          | 6.566.984.500,00                     | -                         | 1.807.669.377,00   | 56.153.123,00                  | 4.703.162.000,00   | -                   | -                                   | -                         | -                             | -                                  | -                        |
|    | JUMLAH                                                | 1.588.897.920.915,93                 | (81.843.518.164,00)       | 198.018.000.000,00 | 3.410.000.000,00               | 943.909.716.072,00 | 1.680.500.000,00    | 8.500.000.000,00                    | 9.095.522.185,50          | 276.573.772.898,00            | 1.000.000.000,00                   | 228.553.927.924,43       |

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Lampiran II Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 20 Tahun 2005

Tanggal : 3 Juni 2005

Tentang : Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005

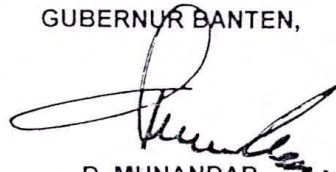
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAU  
TRIWULAN : .....

| NO | PASAL DAN DIGIT | URAIAN | ANGGARAN<br>TAHUN 2005 | REALISASI KREDIT TRIWULAN |    |     |    | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|-----------------|--------|------------------------|---------------------------|----|-----|----|--------|------------|
|    |                 |        |                        | I                         | II | III | IV |        |            |
| 1  | 2               | 3      | 4                      | 5                         | 6  | 7   | 8  | 9      | 10         |
|    |                 |        |                        |                           |    |     |    |        |            |

Serang, .....  
KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR

NAMA JELAS  
NIP.

GUBERNUR BANTEN,

  
D. MUNANDAR